



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023**

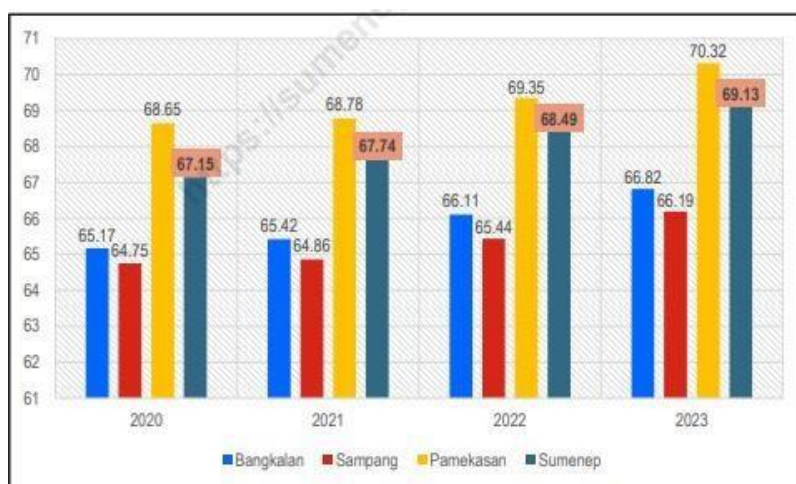
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dipublikasikan melalui media cetak dan/ atau media elektronik di daerah yang merupakan kewajiban Kepala Daerah sesuai Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini disusun untuk menjelaskan tentang Capaian Kinerja Makro, Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar, Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya, Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah serta Inovasi Daerah, selama 1 (satu) tahun anggaran.

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Berikut hasil Capaian kinerja makro di Kabupaten Sumenep mulai pada tahun 2022 dan 2023 :

No	Indikator Kinerja Makro	TAHUN 2022	TAHUN 2023	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	68.49	69.13	0.83
2	Angka Kemiskinan	18.76	18.70	0.06
3	Angka Pengangguran	1.36	1.71	0.35
4	Pertumbuhan Ekonomi	3.11	5.35	3.62
5	Pendapatan Per kapita	35.416	37.370	1.954
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.26	0.28	0.02

1. Indeks pembangunan Manusia



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar IPM Kabupaten Sumenep dan IPM Kabupaten di Pulau Madura, 2020 – 2023

IPM Kabupaten Sumenep selalu berada jauh dibawah Provinsi Jawa Timur. pada tahun 2023, selisihnya cukup besar, yakni mencapai 5,52. Jika dilihat pada cakupan yang lebih kecil, yakni Pulau Madura, sejak tahun 2020 hingga 2023 IPM Kabupaten Sumenep merupakan IPM tertinggi kedua di Pulau Madura. Posisi teratas ditempati oleh Kabupaten Pamekasan, diikuti Kabupaten Bangkalan peringkat ketiga dan Kabupaten Sampang peringkat

terakhir. Peringkat IPM di Pulau Madura tersebut tidak berubah selama 4 tahun terakhir.

IPM Kabupaten Sumenep di Jawa Timur berada pada peringkat ke-36 dari 38 Kabupaten/Kota. Namun, pada periode tahun 2020 - 2023, IPM Kabupaten Sumenep mengalami rata - rata pertumbuhan tertinggi di Pulau Madura, yakni tumbuh sebesar 0,97 persen, disusul oleh Kabupaten Bangkalan yang tumbuh sebesar 0,84 persen, selanjutnya Kabupaten Pamekasan yang tumbuh sebesar 0,81 persen dan Kabupaten Sumenep yang tumbuh sebesar 0,74 persen. Untuk IPM Kabupaten Sumenep, pertumbuhan terbesar terjadi pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan dan Usia Harapan Hidup (UHH), yakni masing-masing tumbuh sebesar 4,46 persen dan 0,26 persen

2. Angka Kemiskinan.

Sesuai Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jika pada tahun 2021 angka kemiskinan di Sumenep mencapai 20,51 persen, memasuki tahun 2022 menyisakan 18,76 persen dan pada 2023 kembali turun menjadi 18,70 persen. Angka kemiskinan di bawah 20 persen merupakan hal baru di Sumenep.

3. Angka Pengangguran

BPS mencatat bahwa angka pengangguran pada tahun 2022 yang ada di Kabupaten Sumenep mengalami penurunan sebesar 1,36% jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya di atas 2 persen, yakni tahun 2021 sebesar 2,31% dan 2020 mencapai 2,84%

Tingkat Pengangguran Tahun 2023 sebesar 1,71 persen atau naik 0,35 persen dibandingkan tahun 2022.

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki Tingkat Pengangguran tertinggi di Kabupaten Sumenep, yaitu sebesar 8,54%

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	65.83	67.96
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92.07	92.75
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	77.33	76.47
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3.81	100

Capaian kinerja urusan pendidikan dibagi kedalam 4 indikator yaitu meningkatnya partisipasi warga Negara usia 5-6 taun yang berpartisipasi dalam PAUD, meningkatnya partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, meningkatnya partisipasi warga Negara usia 13-15 th yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah utama, serta indikator yang terakhir adalah meningkatnya partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Capaian kinerja masing-masing indikator tersebut berturut-turut mencapai 67.96%, 92.75%, 76.47%, dan 100%.

b. Kesehatan

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0.04	0.54
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	80	100

3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93.94	95.83
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98.66	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98.41	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96.89	95,70
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83.41	88,05
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80.03	89,17
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	85.62	90,70
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64.35	83,36
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97.50	97,49
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	95.84	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90.50	100

Urusan pemerintahan di bidang kesehatan dibagi menjadi 14 indikator, masing-masing indikator terbut antara lain rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk dengan capaian kinerja 0.54%, Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi mencapai 100%, Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 95.83%, Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100%, Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100%, Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 95,70%, Persentase anak usia

pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 88,05%, Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 89,17%, Persentase warga Negara usia 60 th keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 90,70%, Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 83,36%, Persentase penderita DM yng mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 97,49%, Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100%, Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100%, Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100%.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	76.89	78,37
2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	20.85	22,02
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80.22	80,52
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	90.03	93,06
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81.63	82,01
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	77.26	78,09

8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	74,54
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	100

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dibagi kedalam 9 indikator yaitu Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten yang mencapai 78,37%, Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai yang merupakan kewenangan kabupaten mencapai 22,02%, Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kab. yang dilayani oleh jaringan irigasi mencapai 80,52%, Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten mencapai 93,06%, Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik mencapai 82,01%, Rasio Kepatuhan IMB mencapai dengan capaian kinerja 100%, tingkat kemantapan jalan sebesar 78,09%, Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan capaian kinerja 74,54% dan indikator yang terakhir Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi mencapai 100%.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	0
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota	0	0

	yang ditangani		
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9.065	8,30
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	80.70	19,24

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dibagi kedalam 5 indikator yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten dengan capaian kinerja 0% diakrenaka Pada saat tahun berlangsungnya bencana ada rumah terdampak bencana namun langsung ditangani oleh BPBD, TNI, POLRI, Ormas sehingga pasca kejadian, rumah yang terdampak bencana sudah terselesaikan, Fasilitas hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah 0% karena tidak program relokasi, Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani dengan capaian 0%, pengurangan rumah tidak layak huni 8.30%, serta capaian jumlah perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum mencapai 19.24%.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	93.44	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.17	0,19
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan	100	98,80

	dan evakuasi korban kebakaran		
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	16,65 Menit	23,55 Menit

Capaian kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dibagi menjadi 7 indikator, yaitu persentase gangguan rantibum yang dapat diselesaikan mencapai 100%, Persentase Perda dan perkara yang ditegakkan mencapai 100%, Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana mencapai 100%, Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 0,19%, Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencapai 100%, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran mencapai 98,80%, serta Waktu tanggap penanganan kebakaran mencapai 23,55 menit.

f. Sosial

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	89,14
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100

Capaian kinerja urusan sosial dibagi menjadi 2 indikator yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti yang mencapai 89,14% dan Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten yang juga mencapai 100%.

3. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

a. Hasil EPPD Tahun 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 bahwa Kabupaten Sumenep mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,1798 dan status kinerja sedang.

b. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022

Berdasarkan Laporan Nomor 470/S-HP/XVIII.SBY/05/2023 tentang hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep , bahwa Kabupaten Sumenep berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022.

4. Ringkasan Realisasi penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.586.552.095.188,33, angka ini lebih besar sekitar Rp. 116.688.528.468,33 dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Sedangkan Realisasi belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.597.258.691.457,00, angka ini lebih kecil sekitar Rp. 295.122.318.401 dari pagu anggaran yang ditetapkan.

5. Inovasi Daerah

Inovasi merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam mendukung capaian kinerja di tahun 2023, pemerintah kabupaten sumenep melakukan berbagai inovasi antara lain sebagai berikut:

No	Judul Inovasi	Jenis	Inisiator
1	SELENTING (Konseling Catin Itu Penting)	Non Digital	Dinas Kesehatan
2	GARDU PULAU (Gerakan ANC Terpadu Ke PULAU)	Non Digital	Dinas Kesehatan

3	DANSA WAMIL (BIDAN DESA WHATSAPP IBU HAMIL)	Non Digital	Dinas Kesehatan
4	ke candi bawa koper	Non Digital	Dinas Kesehatan
5	PPI (POS PEDULI IBU)	Non Digital	Dinas Kesehatan
6	KUPAT MNIATUR TBC (KEPATUHAN MINUM OBAT SECARA TERATUR PADA TBC)	Non Digital	Dinas Kesehatan
7	SITI TUKUL (Awasi Obati Tuberculosis)	Digital	Dinas Kesehatan
8	CENDEKIA (Cepat Lindungi Anak Dengan KIA)	Non Digital	Disdukcapil
9	SISTEM INFORMASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (SIPBRO)	Digital	Setda
10	PDKT (Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi)	Non Digital	Disdukcapil
11	ERTIGA PLUS PLUS	Non Digital	Dinas Kesehatan
12	Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112	Digital	Kominfo
13	DEBAT SI MANIS	Non Digital	Dinas Kesehatan
14	HOMPIMPA	Digital	Dinas Kesehatan
15	JURNAL KARATON (ONLINE)	Digital	Bappeda
16	SiCakap (Aplikasi Cerdas Kelembagaan Perikanan)	Digital	Dinas Perikanan
17	POS KELING PLUS	Non Digital	DKPP
18	SILAHKAN (Sistem Infomasi Layanan Harian Kepegawaian)	Digital	BKPSDM
19	DIGDAYA	Digital	DPMD
20	SI LAHAN (Sistem Informasi Spasial Lahan Pertanian)	Digital	DKPP
21	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN DI KABUPATEN SUMENEP	Non Digital	Satpol PP
22	UPG BISMILLAH MELAYANI	Non Digital	Inspektora t
23	E-BPHTB	Digital	BPPKAD
24	E-SuTangGab (Elektronik Sumenep Tanggap Bencana)	Digital	BPBD
25	SARONIN (Sarana Komunikasi dan Informasi Internal)	Digital	Inspektora t
26	Medical Record Spotter (MRS)	Digital	Inspektora t
27	Manajemen Survey Kepuasan Masyarakat (Aplikasi Android)	Digital	Inspektora t

28	PENYULUHAN PERTANIAN DENGAN METODE PODCAST DI BPP GAPURA	Non Digital	DKPP
29	Nganjhu A Bhereng (Pendampingan Dan Kunjungan Rumah Kepada Keluarga Tidak Mampu Untuk Balita Kurang Gizi)	Non Digital	Dinas Kesehatan
30	MATCHA (Mari Cari Tahu tentang Farmasi)	Non Digital	Dinas Kesehatan
31	GERDU CENTINI (GERakan terpaDU CEgah stuNTIng sejak diNI)	Digital	Dinas Kesehatan
32	KASIH SEIBA TERPADU (PEKARANGAN SEHAT SELAMATKAN IBU DAN BAYI)	Non Digital	Dinas Kesehatan
33	KOPI DIET	Non Digital	Dinas Kesehatan
34	YUTUBER KELILING (Layanan Tuberkulosis Berkeliling)	Non Digital	Dinas Kesehatan
35	KAMPUNG SEPASAK (KAMPUNG SEHAT BEBAS TANPA ASAP ROKOK)	Non Digital	Dinas Kesehatan
36	OPOR SANTEN MAMALEN (Optimalisasi Prolanis Pasien Hipertensi dan Kecing Manis)	Non Digital	Dinas Kesehatan
37	SEJATI (SEHAT JIWA DAN PRODUKTIF)	Digital	Dinas Kesehatan
38	CEKAL BU SITI (Cek, Awasi, Lindungi Ibu Hamil Resiko Tinggi)	Digital	Dinas Kesehatan
39	ELIT TEMULAWAK	Digital	Dinas Kesehatan
40	SIAP LAHIR (Aplikasi Dokumen kependudukan bayi baru lahir)	Digital	Dinas Kesehatan
41	KACA CENTING (Kawal Catin Cegah Stunting)	Digital	Dinas Kesehatan
42	KANCIL KABBI ASAPOK (Kader Cilik Keluarga Bebas Asap Rokok)	Non Digital	Dinas Kesehatan
43	BISIK (Bincang Asik Seputar Informasi Kesehatan)	Non Digital	Dinas Kesehatan
44	Digitalisasi Pemasaran Produk Pertanian	Digital	DKPP
45	BERBATIK (Bersama Berantas Jentik)	Non Digital	Dinas Kesehatan
46	KENCAN BERDUA (KELAS BIMBINGAN CALON PENGANTIN BERKUALITAS, TERPADU & AKTIF)	Non Digital	Dinas Kesehatan
47	PERAHU (PELAYANAN KESEHATAN TERPADU) PUSKESMAS GAYAM	Non Digital	Dinas Kesehatan
48	PEDULI RASA	Non Digital	Dinas Kesehatan

49	JUNINGSIH PLUS	Non Digital	Dinas Kesehatan
50	KFC	Non Digital	Dinas Kesehatan
51	GARDU BARELA (Gerakan Terpadu Peningkatan Kesehatan Bagi Balita, Remaja dan Lansia)	Non Digital	Dinas Kesehatan
52	"MARLINA SEKSI" MARI PERDULI ANAK STUNTING / KURANG GIZI	Digital	Dinas Kesehatan
53	BALING - BALING SETAN	Non Digital	Dinas Kesehatan
54	SiKaPal (Sistem Keamanan Pelayaran)	Digital	Kepala Daerah
55	SUKMA PUTI (MASUK RUMAH PUNTUNG ROKOK MATI)	Non Digital	Dinas Kesehatan
56	EKZIS+	Non Digital	Dinas Kesehatan
57	SiMonalisa (Sistem Informasi dan Monitoring Administrasi Desa)	Digital	Kecamatan Talango
58	JAMPER (Jaminan Penyeberangan)	Non Digital	Kecamatan Talango
59	SKPHP (Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan)	Digital	Dinas Perikanan
60	PANGESTO (Pengelolaan Informasi Terpadu Online)	Digital	Kecamatan Pasongsongan
61	DHAPOR (Layanan Pelaporan Gangguan Trantibum)	Digital	Kecamatan Pasongsongan
62	Super Penting (Sinkronisasi Urusan Dalam Percepatan Penurunan Stunting)	Non Digital	Kecamatan Pasongsongan
63	Kompak (Klinik Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan)	Non Digital	Kecamatan Pasongsongan
64	ROMA (Ruang Obrolan, Membaca dan Aspirasi)	Non Digital	Kecamatan Pasongsongan

6. Penutup

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini disusun sebagai dasar evaluasi pemerintah pusat untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Tahun 2023 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik itu strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pemulihan ekonomi sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indikator Makro yang mulai memberikan perubahan yang cukup signifikan. Jika dibanding dengan capaian pada tahun 2022 beberapa indikator makro tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup baik yaitu Indeks Pembangunan Manusia, penurunan angka kemiskinan, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendapatan (PDRB) Per Kapita. Sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan, pemerintah daerah diwajibkan membuat dan menyampaikan capaian kinerja tahunan kepada masyarakat dalam bentuk Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2023 ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas program dan kegiatan yang telah dilakukan. dengan harapan semoga senantiasa dapat dijadikan bahan informasi, maupun referensi sekaligus bahan evaluasi dan motivasi dalam penyempurnaan kinerja Pemerintahan Daerah pada tahun yang akan datang.